

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Sumbangan Rekonstruksi Teori

Disertasi ini ditulis dengan menggunakan pisau analisis tiga teori utama, yaitu teori oligarki Jeffrey Winters, teori oligarki Richard Robison dan Vedi R Hadiz, serta teori ekologi politik Raymond L Bryant and Sinéad Bailey. Untuk teori pendukung adalah teori ekonomi politik agraria Henry Bernstein. Bab ini akan menguraikan bagaimana kebijakan biodiesel telah bermetamorfosis menjadi instrumen *wealth defense* (pertahanan kekayaan) bagi para oligark, alih-alih menjadi alat transformasi sosial-ekologi.

Oligarki biasanya didefinisikan sebagai kekuasaan oleh segelintir orang (*rule by few*)¹. Winters berargumen bahwa jumlah orang berkuasa sebenarnya bukanlah fondasi utama dari teori Aristoteles tentang *oligarki*². Winters menyematkan dua elemen kunci kepada oligarki. Pertama, mereka memiliki konsentrasi kekayaan material ekstrem sebagai sumber kekuasaan³. Ketimpangan kekayaan material yang ekstrem menghasilkan ketimpangan politik yang ekstrem pula. Baik di negara demokrasi maupun sistem otoriter, semakin timpang distribusi kekayaan material, semakin besar kekuasaan dan pengaruh individu-individu yang menguasai kekayaan material secara ekstrem, dan intensitas

¹ *Oligarki* berasal dari kata Yunani *oligarkhia*, yang terdiri dari *oligoi* (yang sedikit) dan *arkhein* (berkuasa).

² Winters, *Oligarchy*, 2.

³ Ibid.

kesenjangan kekayaan material itu sendiri yang mewarnai motif dan tujuan politik para oligarki⁴.

Elemen kedua, oligarki beroperasi secara politik untuk mempertahankan konsentrasi kekayaan (*wealth defense*)⁵. Pertahanan kekayaan (*wealth defense*) menjadi konsep penting dalam teori Winters tentang oligarki. Ini karena sebagai aktor dengan kekayaan ekstrem, oligark menghadapi tantangan dan ancaman yang secara langsung diarahkan kepada sumber-sumber kekayaan material yang mereka miliki. Hal itu bisa datang dari negara, penguasa kuat, massa secara kolektif, dan bahkan dari oligark lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Jadi, Winters memandang bahwa karakter dan modus oligarkis berupa pertahanan kekayaan ini baru dikerahkan atau diaktifkan ketika muncul tantangan dan ancaman tersebut, dan jenis tantangan dan ancaman itu juga akan menentukan jenis respons strategis pertahanan kekayaan oligarki. Ancaman atau tantangan yang dihadapi oleh oligarki dapat menjadi elemen kunci ketiga dari teori oligarki Winters.

Oleh karena itu, berbeda dengan definisi tradisional tentang oligarki yang mengaitkannya dengan kekuasaan, Winters justru melihat bahwa oligarki tidak mesti berkaitan dengan sistem kekuasaan oleh aktor-aktor tertentu⁶. Oligark bisa saja memilih untuk berkuasa secara langsung tapi bisa juga hanya menempel pada penguasa otoriter atau demokrasi.

⁴ Michele Ford dan Thomas B. Pepinsky, ed., *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*, Cornell Modern Indonesia Project, no. 77 (Southeast Asia Program Publications, Southeast Asia Program, Cornell University, 2014), 11.

⁵ Winters, *Oligarchy*, 6–7.

⁶ Ford dan Pepinsky, *Beyond Oligarchy*, 14–15.

Selanjutnya, teori oligarki Robison dan Hadiz penting dipaparkan untuk melengkapi teori oligarki Winters. Ini karena Robison dan Hadiz secara khusus mengobservasi kasus di Indonesia. Robison dan Hadiz juga berkontribusi dalam memetakan posisi paradigmatis teori oligarki di tengah teori-teori ekonomi politik lainnya.

Robison dan Hadiz memandang oligarki sebagai sebuah sistem relasi kuasa yang memungkinkan terjadinya konsentrasi kekayaan dan kewenangan, serta pertahanan kolektif terhadap semua itu⁷. Dengan definisi ini, kita melihat titik temu antara Robison-Hadiz dengan Winters dan fokus yang berbeda di antara keduanya. Titik temu mereka ada pada dua elemen kunci: konsentrasi kekayaan dan pertahanan kekayaan. Namun, Robison-Hadiz lebih menekankan pada oligarki sebagai kolektivitas, dan ini mereka tunjukkan dengan menyatakan oligarki sebagai relasi, fusi, atau pakta di antara kepentingan politik-bisnis⁸, sedangkan Winters lebih menekankan oligarki sebagai individu.

Sependapat dengan Winters, Robison-Hadiz memandang bahwa oligarki dapat bertahan dan berkembang dalam berbagai jenis rezim, termasuk demokrasi, seperti yang saat ini terjadi di Indonesia pasca-Soeharto. Baik Robison-Hadiz dan Winters menyatakan bahwa oligarki yang sudah mengakar di Indonesia sejak periode kekuasaan Soeharto mampu menemukan cara-cara baru dalam mempertahankan kekayaan menghadapi terpaan kejutan perubahan dalam institusi ekonomi dan politik setelah 1998, termasuk dalam menghadapi tantangan pasar

⁷ Richard Robison dan Vedi R Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, 2004, 37.

⁸ Ibid., 28.

yang semakin mengglobal dan demokrasi yang terdesentralisasi serta berbasis pada politik elektoral.

Sementara itu, Bryant dan Bailey dalam teori ekologi politik menitikberatkan hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungan di negara-negara berkembang atau yang dikenal dengan ekologi kultural⁹. Pendekatan ini percaya bahwa problem lingkungan di Dunia Ketiga (*third world country*) bisa dipahami melalui isu-isu sosial tertentu, seperti kemiskinan dan laju pertumbuhan penduduk. Kebijakan yang kemudian lahir dari rekomendasi penelitian ekologi kultural antara lain adalah pengentasan kemiskinan, pengendalian kelahiran, manajemen lingkungan partisipatoris, pembangunan berkelanjutan, dan konservasi lingkungan¹⁰. Bryant dan Bailey menilai pendekatan ini mengalami kebuntuan karena ia gagal membaca karakter dan dinamika dari problem-problem kunci lingkungan di Dunia Ketiga, yakni ketimpangan distribusi sumber daya (*resources*) dan kuasa (*power*) di dalam masyarakat¹¹.

Bernstein dalam bukunya *Class Dynamics of Agrarian Change*, memberikan kerangka dasar ekonomi politik agraria untuk memahami bagaimana kapitalisme mentransformasi dunia pedesaan. Teori ini menekankan bahwa perubahan agraria tidak bersifat teknis semata, melainkan didorong oleh hubungan kekuasaan dan relasi kelas yang menentukan dinamika produksi serta akumulasi kapital. Inti dari teori Bernstein adalah empat pertanyaan kunci untuk menganalisis dinamika kelas di pedesaan: Siapa memiliki apa? (Distribusi

⁹ Lawrence S. Grossman dkk., "Third World Political Ecology," *Geographical Review* 89, no. 1 (1999): 12, <https://doi.org/10.2307/216150>.

¹⁰ Ibid., 3–4.

¹¹ Ibid., 3, 27.

kepemilikan tanah dan modal). Siapa melakukan apa? (Pembagian kerja dan peran dalam proses produksi). Siapa mendapatkan apa? (Distribusi surplus atau keuntungan yang dihasilkan). Apa yang mereka lakukan dengan surplus tersebut? (Apakah untuk investasi modal/akumulasi atau sekadar bertahan hidup).

Bernstein berargumen bahwa kapitalisme agraria seringkali mengarah pada apropriasi, di mana hasil produksi petani hanya menjadi input bagi industri besar, dan substitusi, di mana fungsi pangan lokal digantikan oleh bahan baku industri global. Proses ini menciptakan diferensiasi kelas: petani kaya yang menjadi pemilik modal, petani menengah yang rentan, dan petani miskin yang terpaksa menjadi buruh upahan.

7.1.1. Kritisi Atas Teori Utama dan Pendukung

Teori Winters mengenai *wealth defense* (pertahanan kekayaan) sangat relevan dalam menjelaskan pembentukan BDPKS. Penulis menunjukkan bahwa BDPKS bukan sekadar lembaga teknokratis, melainkan instrumen politik yang digunakan oleh oligarki untuk mempertahankan konsentrasi kekayaan mereka di tengah fluktuasi harga CPO global. MPI (*Material Power Index*) yang tinggi di Indonesia menjadi basis mengapa segelintir konglomerat mampu mendikte kebijakan biodiesel.

Meskipun Winters sangat kuat dalam menjelaskan motivasi individu oligark berdasarkan kekuatan material, penulis disertasi memberikan kritik implisit bahwa Winters cenderung melihat oligarki sebagai aktor individual yang defensif. Dalam kasus biodiesel, penulis menemukan bahwa oligarki tidak hanya defensif tetapi juga proaktif dan kolektif. Mereka tidak hanya menunggu ancaman

terhadap kekayaan mereka, tetapi secara aktif menciptakan mekanisme akumulasi baru melalui regulasi negara (mandatori biodiesel). Winters kurang menekankan bagaimana institusi demokrasi (seperti BPD PKS) secara struktural dirancang untuk memfasilitasi akumulasi tersebut, bukan sekadar melindunginya.

Sementara itu, dalam teori reorganisasi oligarki Robison & Hadiz, teori ini membantu penulis menjelaskan bagaimana oligarki menjajah (*occupy*) institusi demokrasi pasca-Orde Baru. BPD PKS dianalisis sebagai bentuk reorganisasi di mana aliansi negara-korporasi menemukan cara baru untuk mengekstraksi surplus melalui kebijakan publik yang tampak legal dan pro-lingkungan. Robison dan Hadiz sangat menekankan pada fusi antara otoritas politik dan kekuatan material dalam skala makro. Namun, dalam isu spesifik seperti biodiesel, teori ini kurang memberikan ruang pada dimensi ekologis dan perlawanan mikro. Robison dan Hadiz cenderung melihat struktur yang sangat dominan sehingga perubahan hanya mungkin terjadi melalui revolusi sosial yang radikal. Penulis disertasi, di sisi lain, menemukan adanya koalisi-kontra (NGO dan serikat petani) yang melakukan perlawanan melalui pengetahuan tandingan (*counter-knowledge*) dan politik mikro di tingkat tapak. Ada dinamika agensi yang lebih kompleks yang tidak sepenuhnya tertampung dalam pesimisme struktural Robison & Hadiz.

Dalam teori ekologi politik Bryant & Bailey, teori tersebut digunakan untuk membongkar narasi hijau biodiesel. Bryant dan Bailey menekankan bahwa masalah lingkungan di Dunia Ketiga adalah manifestasi dari hubungan kekuasaan yang tidak setara. Penulis berhasil menerapkan ini untuk menunjukkan bahwa biodiesel bukan solusi iklim yang netral, melainkan lingkungan yang terpolitisasi

(*politicized environment*) yang menguntungkan korporasi dan meminggirkan petani swadaya. Kritik penulis terhadap Bryant & Bailey (serta ekologi politik secara umum) adalah bahwa teori ini seringkali berhenti pada analisis dampak lingkungan dan ketimpangan sosial di tingkat lokal. Penulis berpendapat bahwa ekologi politik perlu diintegrasikan secara lebih kuat dengan analisis ekonomi-politik oligarki. Tanpa memahami mekanisme *wealth defense* dan reorganisasi kekuasaan di tingkat pusat (seperti melalui BPD PKS), analisis ekologi politik hanya akan melihat gejala (deforestasi, konflik lahan) tanpa mampu menyentuh akar penggerak utamanya di tingkat kebijakan makro.

Teori ekonomi politik agraria Henry Bernstein sangat relevan dan menjadi salah satu fondasi utama dalam disertasi ini. Penulis menggunakan empat pertanyaan kunci Bernstein (Siapa memiliki apa? Siapa melakukan apa? Siapa mendapatkan apa? Dan apa yang dilakukan dengan surplusnya?) untuk membedah struktur industri kelapa sawit dan biodiesel di Indonesia. Meskipun teori Bernstein sangat berguna, penulis melihat adanya keterbatasan teori tersebut dalam menjelaskan dinamika terbaru di era neoliberal dan rezim biodiesel. Literatur agraria klasik Bernstein terlalu banyak berfokus pada akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*) dalam bentuk pengambilalihan fisik tanah (*land grabbing*). Bernstein kurang mengeksplorasi bagaimana perampasan bisa terjadi tanpa pengusiran fisik, yaitu melalui mekanisme keuangan dan regulasi yang canggih di tingkat negara. Teori ini kurang mendetail dalam membedah bagaimana institusi spesifik seperti BPD PKS yang bekerja sebagai

instrumen aliansi negara-korporasi yang secara teknokratis merancang sistem ekstraksi nilai dari petani termiskin untuk oligarki terkaya.

7.1.2 Gap Penelitian dan Novelty

Penulis sejauh ini belum menemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik menggunakan teori oligarki Winters untuk membedah kebijakan biodiesel dan pembentukan BPDPKS. Inilah yang menjadi letak kebaruan (*novelty*) utama disertasi penulis. Disertasi ini mengisi kekosongan (*gap*) literatur karena mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan lain. Penggunaan pisau analisis *Wealth Defense* dari Winters untuk kasus subsidi biodiesel merupakan orisinalitas studi ini. Terdapat beberapa studi penting yang membahas biodiesel dan sawit, namun dengan fokus dan teori yang berbeda. Studi paling mirip (*closest match*) dilakukan oleh Arie Yanwar Kapriadi (2019) dari Universitas Exeter dengan judul: "*Biofuel Policy and Politics in Indonesia: How Large Agro Industries Gained Favour from Government Biofuel Policy*". Kapriadi fokus pada konstruksi politik dan materialitas tanaman (interaksi antara pemerintah, industri BBN, dan materialitas tanaman jarak pagar vs sawit).

Perbedaan hasil atau temuan Kapriadi dengan penulis adalah bahwa Kapriadi berargumen tentang keberpihakan kebijakan pada industri sawit besar merupakan hasil dari proses politik yang kompleks dan sejarah kebijakan agraria sejak masa lalu, serta struktur pasar yang alamiah. Ia melihat dominasi sawit lebih sebagai konsekuensi historis dan material, bukan semata-mata manipulasi industri. Sedangkan disertasi penulis membantah (atau menajamkan) pandangan Kapriadi dengan teori Winters. Sedangkan penulis menemukan bahwa kebijakan ini bukan

sekadar proses historis yang alamiah, melainkan sebuah strategi aktif Pertahanan Kekayaan (*Wealth Defense*). Oligarki secara sengaja membelokkan kebijakan (dari jarak pagar ke sawit) untuk menstabilkan harga CPO saat pasar global jatuh. Penulis membuktikan adanya intervensi sadar (manipulasi) melalui pembentukan BPDPKS.

Penulis menyimpulkan bahwa *novelty* dalam disertasi ini valid dan kuat karena secara teoretis penulis adalah yang pertama kali “mengawinkan” teori oligarki Winters (*wealth defense*) dengan ekologi politik untuk kasus kebijakan biodiesel. Studi sebelumnya, yaitu milik Kapriadi, menggunakan pendekatan politik umum dan bukan kerangka spesifik *wealth defense*. Hal ini berbeda dengan temuan Kapriadi yang melihat dominasi sawit sebagai evolusi historis, sementara penulis menemukannya sebagai mekanisme penyelamatan aset (*bailout*) terselubung bagi oligarki saat krisis harga CPO terjadi dengan menggunakan instrumen negara bernama BPDPKS.

7.2. Konfirmasi Temuan Lapangan

Disertasi ini mengonfirmasi teori utama dan teori pendukung serta temuan di lapangan bahwa narasi besar yang didengungkan pemerintah tentang kedaulatan energi dan energi hijau yang dikampanyekan melalui program mandatori biodiesel, mulai dari B20, B30, B35, B40, dan wacana B50 adalah sebuah paradoks semata. Temuan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang semakin dalam, degradasi lingkungan yang persisten, dan

marginalisasi aktor-aktor agraria kecil (sesuai dengan teori Winters, Bryant dan Bailey serta, Bernstein).

Konfirmasi temuan lapangan memperkuat dan mempertajam penjelasan dalam bab-bab sebelumnya. Interaksi langsung, observasi, dan wawancara mendalam dengan para petani swadaya, aktivis, serta analisis terhadap realitas sosial-ekonomi dan ekologis di tingkat tapak, memberikan bukti tak terbantahkan bahwa cengkeraman oligarki di sektor kelapa sawit dan biodiesel telah melahirkan krisis multidimensional yang sistemik. Perilaku oligarki yang telah mengakar dan menguasai sumber daya alam (SDA) dari hulu ke hilir secara nyata telah mengancam kedaulatan energi bangsa (sesuai dengan teori oligarki Winters dan Robison-Hadiz). Dalih kepentingan nasional dan kemandirian energi yang dikemas apik dalam bentuk kebijakan biodiesel terbukti di lapangan menjadi selubung bagi praktik akumulasi kekayaan segelintir elite (sesuai dengan teori oligarki Winters). Ancaman ini bukan sekadar diskursus kebijakan, tapi menjelma menjadi ancaman nyata bagi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat (sesuai dengan teori Bryant dan Bailey serta Bernstein).

Kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik bisnis ekstraktif para oligarki sangat merugikan para petani swadaya yang posisinya semakin terpinggirkan, dan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang harus menanggung beban kerusakan yang ditimbulkan. Penulis menegaskan posisi tidak setuju terhadap segala bentuk praktik oligarki karena yang mereka lakukan secara fundamental mencederai rasa perikemanusiaan (*sense of humanity*) dan melanggar amanat konstitusi. Secara spesifik, praktik-praktik ini bertentangan dengan jiwa dan semangat Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realitas di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu kemakmuran terkonsentrasi pada segelintir pihak (sesuai teori Winters), sementara petani swadaya justru menanggung dampak buruk berupa kerusakan lingkungan dan kehancuran struktur ekonomi lokal (sesuai teori Bryant & Bailey dan Bernstein). Di titik inilah, Indonesia berada dalam persimpangan krusial yang menuntut kehadiran seorang pemimpin yang adil, tegas, dan konsisten dalam membela kepentingan rakyat serta menegakkan amanat konstitusi. Pertanyaannya, siapa yang harus mengemban tugas berat ini dan menjalankan mandat keadilan bagi para petani swadaya dan seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya tidak terletak pada satu individu, melainkan pada sebuah kepemimpinan kolektif yang terinstitusionalisasi, sebuah negara yang berfungsi sebagai pelindung rakyat, bukan fasilitator kepentingan korporasi. Negara, melalui seluruh aparaturnya, harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa pengelolaan SDA berjalan secara lestari demi menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

7.3. Kesimpulan

Temuan pada Bab VII ini merupakan kesimpulan berdasarkan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) dalam beberapa bab sebelumnya, yaitu Bab II, III, IV, V, dan VI. Sesuai dengan pertanyaan penelitian

yang disampaikan pada Bab I, berikut ini adalah beberapa poin penting kesimpulan yang bisa disampaikan oleh penulis.

1. Apakah industri kelapa sawit dan biodiesel di Indonesia berkarakter oligarkis?

Berdasarkan paparan data empiris dan analisis teoretis, Bab II memberikan jawaban afirmatif yang tegas: Ya, industri kelapa sawit dan biodiesel di Indonesia sepenuhnya berkarakter oligarkis. Industri kelapa sawit dan biodiesel di Indonesia bukan sekadar arena pasar bebas, melainkan struktur ekonomi-politik yang dikendalikan oleh segelintir elite melalui konsentrasi kekayaan material yang ekstrem dan penguasaan rantai pasok dari hulu ke hilir. Bab II membuktikan bahwa industri sawit dan biodiesel Indonesia dioperasikan di bawah kendali aliansi negara-korporasi. Melalui konsentrasi lahan, dominasi pasar yang monopolistik, dan kemampuan mendikte regulasi (seperti kasus BPDPKS dan revisi Permentan), para pelaku industri ini telah memenuhi seluruh indikator sebagai entitas oligarkis. Mereka tidak hanya berbisnis, tetapi berpolitik untuk memastikan akumulasi kekayaan mereka terus berputar, seringkali dengan mengorbankan petani kecil dan keuangan negara.

2. Bagaimana implementasi kebijakan biodiesel: oligarki dalam transisi kebijakan biodiesel?

Implementasi kebijakan biodiesel di Indonesia merekam jejak pembajakan kebijakan yang nyata. Bab III ini membuktikan bahwa transisi dari era *Jarak Pagar* ke era *Kelapa Sawit* bukan sekadar perubahan teknis bahan baku, melainkan pergeseran fundamental struktur ekonomi-politik: dari narasi pemberdayaan rakyat menuju penguasaan oligarki. Bab III berhasil

membuktikan bahwa implementasi kebijakan biodiesel adalah cermin dari fleksibilitas oligarki. Mereka mampu mengubah krisis energi menjadi peluang bisnis dengan menunggangi kebijakan negara. Transisi dari jarak pagar ke sawit adalah bukti konkret bagaimana negara memfasilitasi pergeseran dari kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan petani menjadi kebijakan yang menjamin akumulasi keuntungan bagi segelintir konglomerasi sawit

3. Bagaimana pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menguntungkan oligarki?

Pembentukan BPDPKS bukan sekadar kebijakan teknis untuk stabilisasi harga, melainkan sebuah operasi penyelamatan aset oligarki (*wealth defense*) yang difasilitasi oleh negara. Bab ini membuktikan bahwa BPDPKS adalah wujud institusional dari aliansi negara-korporasi yang dirancang untuk mengamankan keuntungan segelintir konglomerat sawit di tengah krisis pasar global. Bab IV menjawab pertanyaan penelitian dengan tegas: BPDPKS menguntungkan oligarki dengan cara mengubah ancaman krisis pasar menjadi peluang profitabilitas yang dijamin negara. Melalui aliansi negara-korporasi, oligarki berhasil mentransfer risiko bisnis mereka menjadi beban publik (pungutan yang dibebankan ke harga TBS petani), sambil memastikan aliran dana triliunan rupiah tetap berputar di lingkaran bisnis mereka sendiri dengan dalih kepentingan nasional dan kedaulatan energi.

4. Bagaimana kritik NGO terhadap kebijakan biodiesel di Indonesia: dampak ekologi dan sosial-ekonomi?

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kebijakan biodiesel Indonesia, yang dinarasikan pemerintah sebagai solusi energi hijau dan pro-rakyat, justru menuai kritik keras dari NGO dan komunitas akademik karena realitas lapangannya yang destruktif. Bab ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menyingkap paradoks kebijakan: klaim keberlanjutan di atas kertas yang bertolak belakang dengan jejak kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial di lapangan. Bab V membuktikan bahwa kritik NGO, seperti WALHI, SHI, Sawit Watch, KKI Warsi, adalah valid: Kebijakan biodiesel di Indonesia bukan instrumen transisi energi yang adil, melainkan mekanisme yang memfasilitasi ekspansi oligarki ke wilayah hutan dan lahan rakyat. Jawaban atas pertanyaan penelitian ini menegaskan bahwa tanpa perbaikan tata kelola yang radikal, kebijakan biodiesel hanya akan mewariskan utang ekologis dan sosial yang masif bagi generasi mendatang, di mana keuntungan diprivatisasi oleh korporasi (seperti Wilmar dan grup besar lainnya) sementara kerugian lingkungan dan sosial disosialisasi ke masyarakat luas.

5. Bagaimana respons petani kecil-swadaya dan lembaga swadaya masyarakat terhadap kebijakan biodiesel di Indonesia?

Temuan di Bab VI berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan memosisikan petani dan NGO bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai Koalisi-Kontra yang melakukan perlawanan terorganisasi. Bab ini membuktikan bahwa respons mereka adalah sebuah upaya politik untuk menegosiasikan ulang posisi tawar di tengah lingkungan yang terpolitisasi (*politicized environment*) yang selama ini dikuasai oleh aliansi negara-

korporasi. Bab VI memberikan jawaban tegas atas pertanyaan penelitian: Respons petani kecil-swadaya dan NGO adalah perjuangan politik yang persisten. Kesimpulan bab ini menegaskan bahwa keadilan agraria di sektor kelapa sawit tidak akan turun dari kebaikan hati pasar atau negara, melainkan harus direbut melalui perjuangan terorganisasi koalisi-kontra dalam menantang dominasi aliansi negara-korporasi.

Perjalanan panjang disertasi ini bermuara pada satu kesimpulan: kebijakan biodiesel Indonesia adalah sebuah paradoks pembangunan yang monumental. Di permukaan, ia tampak sebagai kisah sukses kemandirian energi dan hilirisasi industri. Namun, pembedahan kritis menyingkap struktur penopangnya yang rapuh: ketidakadilan agraria, kerusakan ekologis, sosial ekonomi, dan dominasi oligarki yang disubsidi negara.

BPDPKS, yang seharusnya menjadi *leveller* (penyeimbang) untuk mengangkat nasib petani, justru beroperasi sebagai mesin sirkulasi kapital yang memperkaya yang kuat dan membiarkan yang lemah tetap rentan. Narasi “energi hijau” telah menjadi selubung yang efektif untuk menutupi praktik *business as usual* yang ekstraktif.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin energi terbarukan dunia yang sejati, bukan hanya dalam volume produksi, tetapi dalam kualitas keadilan dan keberlanjutannya. Hal ini hanya mungkin terjadi jika ada keberanian politik untuk membongkar aliansi oligarkis, mereformasi tata kelola dana sawit secara radikal, dan menempatkan petani serta lingkungan hidup sebagai pusat dari setiap kebijakan energi. Tanpa transformasi ini, ambisi menjadi

raja energi hijau melalui B50 hanya akan mewariskan kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi dan sosial yang akan dibayar mahal oleh generasi mendatang.

7.4 Rekomendasi

Disertasi ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan dapat ditindaklanjuti (*actionable*). Rekomendasi ini merupakan suatu upaya untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang ditujukan untuk mereformasi tata kelola sawit dan biodiesel agar lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah rekomendasi yang diusulkan penulis.

7.4.1. Reformasi Kelembagaan BPDPKS

Status quo tata kelola BPDPKS tidak dapat dipertahankan jika pemerintah serius ingin menyejahterakan petani.

1. **Restrukturisasi Komite Pengarah:** Pemerintah harus merevisi Perpres Nomor 61 Tahun 2015 untuk merombak struktur Komite Pengarah BPDPKS. Unsur petani (seperti perwakilan dari Serikat Petani Kelapa Sawit/SPKS atau asosiasi petani independen lainnya) harus dilibatkan secara formal dan memiliki hak suara dalam penentuan kebijakan penggunaan dana. Ini krusial untuk memastikan perspektif petani tidak lagi diabaikan.
2. **Transparansi dan akuntabilitas:** BPDPKS wajib membuka data neraca keuangan secara rinci kepada publik, termasuk daftar perusahaan penerima subsidi biodiesel dan besaran dana yang diterima. Transparansi ini penting untuk mencegah *moral hazard* dan konflik kepentingan, mengingat

indikasi adanya *politically exposed persons* (PEPs) dalam struktur korporasi penerima subsidi.

3. **Rebalancing alokasi dana:** perlu ada aturan yang mengikat (*earmarking*) mengenai proporsi penggunaan dana. Subsidi biodiesel tidak boleh menyedot mayoritas dana (yang pernah mencapai >80%). Harus ada batas atas (*cap*) untuk subsidi energi, dan batas bawah (*floor*) minimal (misalnya 30-40%) yang wajib dialokasikan untuk program hulu: PSR, sarana-prasarana, dan pengembangan SDM petani.

7.4.2. Strategi Mandatori Biodiesel (B40/B50) yang Hati-hati

Ambisi pemerintah menuju B50 harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

1. **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):** sebelum meningkatkan mandatori ke B50, pemerintah wajib melakukan KLHS menyeluruh untuk memetakan ketersediaan lahan dan risiko deforestasi. Jika produktivitas lahan *existing* tidak mencukupi, target B50 harus ditunda untuk mencegah pembukaan hutan primer dan gambut.
2. **Jaminan Pasokan Pangan (DMO):** kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk minyak goreng harus diperkuat dan diintegrasikan dengan kebijakan biodiesel. Pemerintah harus menjamin bahwa alokasi CPO untuk energi tidak akan pernah mengorbankan ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng bagi rakyat.
3. **Diversifikasi bahan baku:** ketergantungan 100% pada sawit untuk biodiesel adalah risiko strategis. Pemerintah harus serius memberikan

insentif riset dan pengembangan untuk bahan baku non-pangan generasi kedua, seperti minyak jelantah (*Used Cooking Oil/UCO*) atau biomassa selulosa, untuk mengurangi kompetisi *food vs fuel*.

7.4.3. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Swadaya

Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan sawit, bukan objek penderita.

1. **Penyelesaian legalitas lahan:** Pemerintah (KLHK dan ATR/BPN) harus mempercepat penyelesaian status lahan petani yang terindikasi masuk kawasan hutan melalui mekanisme Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 110A/110B) dengan pendekatan pemutihan atau perhutanan sosial, bukan kriminalisasi. Tanpa legalitas, petani tidak bisa mengakses PSR dan sertifikasi ISPO.
2. **Akselerasi PSR:** birokrasi pengajuan dana PSR harus dipangkas. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) harus disederhanakan. BPD PKS perlu “menjemput bola” dengan memperbanyak pendamping di lapangan untuk membantu petani melengkapi administrasi.
3. **Subsidi pupuk khusus:** mengingat tingginya harga pupuk yang menggerus pendapatan petani, BPD PKS disarankan mengalokasikan dana khusus untuk subsidi pupuk bagi petani swadaya yang terdaftar (memiliki STDB), sebagai insentif langsung peningkatan produktivitas.
4. **Pabrik mini CPO berbasis komunitas:** pemerintah mewajibkan BUMN (Pertamina) untuk membeli CPO atau biodiesel secara langsung dari pabrik-pabrik mini yang dikelola oleh koperasi petani swadaya, bukan

hanya dari konglomerasi. Mandat pembelian ini harus dituliskan secara eksplisit dalam regulasi untuk memecah monopoli pasokan yang selama ini dinikmati grup besar¹².

7.4.4. Melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Institusi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) seharusnya dapat menjadi motor penggerak inovasi yang bersinergi dan berkolaborasi secara erat dengan BPDPKS.

1. **Produksi Bibit Unggul:** Mengembangkan dan mendistribusikan bibit sawit unggul yang terjangkau bagi petani swadaya untuk meningkatkan produktivitas per hektar tanpa harus melakukan ekspansi lahan.
2. **Inovasi Teknologi:** Menerapkan teknologi presisi dalam pertanian, pemantauan lahan, dan mitigasi dampak lingkungan untuk memperbaiki tata kelola sektor sawit secara keseluruhan.

7.5 Keterbatasan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, disertasi ini tidak lepas dari keterbatasan yang perlu diakui secara jujur untuk menempatkan temuan dalam konteks yang tepat.

1. *Keterbatasan akses data keuangan korporasi:* analisis mengenai keuntungan spesifik yang diperoleh grup korporasi dari subsidi biodiesel didasarkan pada data sekunder, laporan publik BPDPKS, dan estimasi pasar. Peneliti tidak memiliki akses ke buku keuangan internal perusahaan

¹² Achmad Surambo, “Wawancara dengan Direktur Sawit Watch,” Desember 2025.

(*audited financial statements*) untuk mengetahui secara presisi struktur biaya produksi (HPP) riil mereka. Hal ini membuat analisis mengenai margin profitabilitas subsidi bersifat estimasi logis, bukan perhitungan akuntansi forensik.

2. *Dinamika kebijakan yang sangat cepat*: sektor sawit dan biodiesel di Indonesia sangat dinamis. Selama penulisan disertasi ini, kebijakan berubah dengan cepat (misalnya perubahan tarif pungutan ekspor yang sering terjadi, transisi dari B30 ke B35, dan uji coba B40/B50). Beberapa data kebijakan mungkin memerlukan pembaruan saat naskah ini dibaca di kemudian hari.
3. *Fokus geografis*: studi lapangan dan wawancara informan kunci lebih banyak terkonsentrasi pada dinamika kebijakan di tingkat pusat (Jakarta) dan sentra sawit mapan (Sumatra Selatan). Dinamika di wilayah *frontier* baru seperti Papua, di mana karakteristik konflik lahan dan relasi kuasa mungkin berbeda, belum tergali sedalam wilayah lainnya.
4. *Kompleksitas variabel ekonomi makro*: analisis dampak ekonomi (seperti inflasi harga pangan) dipengaruhi oleh banyak variabel eksternal (perang Ukraina-Rusia, gangguan rantai pasok global, El Nino) yang sulit diisolasi sepenuhnya hanya pada faktor kebijakan biodiesel semata.

7.6. Arah Penelitian di Masa Depan

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, disertasi ini mengusulkan beberapa agenda penelitian masa depan yang krusial bagi komunitas akademik dan pengambil kebijakan.

7.6.1. Studi Komparatif Tata Kelola Dana Sawit (Indonesia vs Malaysia)

Penelitian masa depan perlu melakukan studi komparatif yang mendalam antara BPDPKS di Indonesia dan *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB) di Malaysia. Data awal menunjukkan bahwa Malaysia memiliki tata kelola yang lebih baik dalam hal inklusi petani kecil, sertifikasi (MSPO yang didanai negara), dan pajak ekspor yang lebih progresif. Mengapa Malaysia berhasil mengintegrasikan petani lebih baik? Apakah struktur oligarki di sana berbeda? Pelajaran dari perbandingan ini akan sangat berharga bagi reformasi BPDPKS.

7.6.2. Dampak Implementasi B50 terhadap Ketahanan Pangan

Seiring dengan rencana pemerintah menuju B50, diperlukan penelitian pemodelan ekonomi yang mendalam untuk memprediksi dampaknya terhadap stabilitas harga minyak goreng domestik dan inflasi pangan. Penelitian ini harus menjawab pertanyaan: pada titik mandatori berapa (B40, B50, atau B60) *tipping point* krisis pangan akan terjadi jika produktivitas stagnan?

7.6.3. Analisis Gender dalam Rantai Pasok Biodiesel

Peran perempuan dalam rantai pasok kelapa sawit, baik sebagai buruh harian lepas (brondol), istri petani yang mengelola keuangan, atau buruh pabrik, seringkali tidak terlihat (*invisible*) dalam analisis makro kebijakan energi. Penelitian masa depan perlu mengadopsi lensa gender untuk melihat bagaimana fluktuasi harga TBS dan ekspansi perkebunan berdampak spesifik dan berbeda terhadap perempuan di perdesaan.

7.7. Penutup

Perjalanan panjang disertasi ini bermuara pada satu kesimpulan yang meresahkan namun penting: kebijakan biodiesel Indonesia adalah sebuah paradoks pembangunan energi hijau. Di permukaan, ia tampak sebagai kisah sukses kemandirian energi dan hilirisasi industri. Namun, ada ketidakadilan agraria, kerusakan ekologis, dan dominasi oligarki yang disubsidi negara. BPDPKS, yang seharusnya menjadi *leveller* (penyeimbang) untuk mengangkat nasib petani, justru beroperasi sebagai mesin sirkulasi kapital yang memperkaya yang kuat dan membiarkan yang lemah tetap rentan. Narasi “energi hijau” telah menjadi selubung yang efektif untuk menutupi praktik *business as usual* yang ekstraktif.

Namun, kesimpulan ini bukan akhir yang pesimistis. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin energi terbarukan dunia yang sejati, bukan hanya dalam volume produksi, tetapi dalam kualitas keadilan dan keberlanjutannya. Hal ini hanya mungkin terjadi jika ada keberanian politik untuk membongkar aliansi oligarkis, mereformasi tata kelola dana sawit secara radikal, dan menempatkan petani serta lingkungan hidup sebagai pusat dari setiap kebijakan energi. Tanpa transformasi ini, ambisi menjadi “raja energi hijau” melalui B50 hanya akan mewariskan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang akan dibayar mahal oleh generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bernstein, Henry. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Agrarian Change and Peasant Studies Series. Halifax: Fernwood Publishing, 2010.
- Bradford, Anu. *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. New York: Oxford University Press, 2020.
- Ford, Michele, dan Thomas B. Pepinsky, ed. *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. Ithaca: Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 2014.
- Hancock, Dawson R., dan Robert Algozzine. *Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers*. New York: Teachers College Press, 2006.
- Hidayat, Herman. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Kapriadi, Arie Yanwar. *Biofuel Policy and Politics in Indonesia: How Large Agro Industries Gained Favour from Government Biofuel Policy*. Exeter: University of Exeter, 2019.
- Kitchin, Rob, dan Nicholas J. Tate. *Conducting Research in Human Geography: Theory, Methodology and Practice*. London: Routledge, 2014.
- Knothe, Gerhard, Jon Harlan Van Gerpen, dan Jürgen Krahl, ed. *The Biodiesel Handbook*. Champaign, IL: AOCS Press, 2010.
- Lal, Deepak. *The Poverty of "Development Economics"*. Edisi ke-3. London: Institute of Economic Affairs, 2002.
- Li, Tania Murray, dan Pujo Semedi. *Plantation Life: Corporate Occupation in Indonesia's Oil Palm Zone*. Durham: Duke University Press, 2021.

O'Sullivan, Elizabethann, Gary Rassel, Maureen Berner, dan Jocelyn DeVance Taliaferro. *Research Methods for Public Administrators*. Edisi ke-6. New York: Routledge, 2017.

Robison, Richard, dan Vedi R. Hadiz. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge, 2004.

Sahdan, Gregorius, dan Zenny Setiyawati, ed. *Petani Buntung di Negeri Sawit: Politik Pengetahuan Membela Petani Sawit*. Yogyakarta: Indonesian Power for Democracy, SPKS, 2019.

Winters, Jeffrey A. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Artikel Jurnal:

Afiff, Suraya. "Engineering the Jatropha Hype in Indonesia." *Sustainability* 6, no. 4 (2014): 1686–1704.

Ariza-Montobbio, Pere, Sharachchandra Lele, Giorgos Kallis, dan Joan Martinez-Alier. "The Political Ecology of Jatropha Plantations for Biodiesel in Tamil Nadu, India." *The Journal of Peasant Studies* 37, no. 4 (2010): 875–897.

Austin, Kemen G., Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, dan Prasad S. Kasibhatla. "What Causes Deforestation in Indonesia?" *Environmental Research Letters* 14, no. 2 (2019): 024007.

Berenschot, Ward, Ahmad Dhiaulhaq, Otto Hospes, Afrizal, dan Daniel Pranajaya. "Corporate Contentious Politics: Palm Oil Companies and Land Conflicts in Indonesia." *Political Geography* 114 (2024): 103166.

Bryant, Raymond L. "Beyond the Impasse: The Power of Political Ecology in Third World Environmental Research." *Area* 29, no. 1 (1997): 5–19.

Dewi, Rosita. "Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan." *Jurnal Interdependence* 1, no. 2 (2013): 152–53.

- Dharmawan, Arya Hadi, Fredian Tonny Nasdian, Baba Barus, dkk. "Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17, no. 2 (2019): 304–315.
- Fatimah, Yuti Ariani. "Fantasy, Values, and Identity in Biofuel Innovation: Examining the Promise of Jatropha for Indonesia." *Energy Research & Social Science* 7 (2015): 108–116.
- Gaveau, David L. A., Douglas Sheil, Husnayaen, dkk. "Rapid Conversions and Avoided Deforestation: Examining Four Decades of Industrial Plantation Expansion in Borneo." *Scientific Reports* 6, no. 1 (2016): 32017.
- Gaveau, David L. A., Bruno Locatelli, Mohammad A. Salim, dkk. "Slowing Deforestation in Indonesia Follows Declining Oil Palm Expansion and Lower Oil Prices." *PLOS ONE* 17, no. 3 (2022): e0266178.
- Grossman, Lawrence S., Raymond L. Bryant, dan Sinead Bailey. "Third World Political Ecology." *Geographical Review* 89, no. 1 (1999): 10–25.
- Hinkes, Cordula. "Adding (Bio)Fuel to the Fire: Discourses on Palm Oil Sustainability in the Context of European Policy Development." *Environment, Development and Sustainability* 22, no. 8 (2020): 7661–7682.
- Kinseng, Rilus A., Fredian Tonny Nasdian, Dyah Ita Mardiyarningsih, dkk. "Unraveling Disputes between Indonesia and the European Union on Indonesian Palm Oil: From Environmental Issues to National Dignity." *Sustainability: Science, Practice and Policy* 19, no. 1 (2023): 2152626.
- Muazis, Mohammad Hasan. "Sengkarut dan Ketumpulan Regulasi Penyelesaian Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan." *Indonesian State Law Review* 3, no. 1 (2020): 23–38.
- Nugraha, M. Fuadillah. "Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 88–105.

- Nurfatriani, Fitri, Ramawati, Galih Kartika Sari, dan Heru Komarudin. "Optimization of Crude Palm Oil Fund to Support Smallholder Oil Palm Replanting in Reducing Deforestation in Indonesia." *Sustainability* 11, no. 18 (2019): 4914.
- Obidzinski, Krystof, Rubeta Andriani, Heru Komarudin, dan Agus Andrianto. "Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and Their Implications for Biofuel Production in Indonesia." *Ecology and Society* 17, no. 1 (2012): 25.
- Orsato, Renato J., Stewart R. Clegg, dan Horacio Falcão. "The Political Ecology of Palm Oil Production." *Journal of Change Management* 13, no. 4 (2013): 444–459.
- Pendrill, Florence, U. Martin Persson, Javier Godar, dan Thomas Kastner. "Deforestation Displaced: Trade in Forest-Risk Commodities and the Prospects for a Global Forest Transition." *Environmental Research Letters* 14, no. 5 (2019): 055003.
- Potapov, Peter, Matthew C. Hansen, Lars Laestadius, dkk. "The Last Frontiers of Wilderness: Tracking Loss of Intact Forest Landscapes from 2000 to 2013." *Science Advances* 3, no. 1 (2017): e1600821.
- Ruysschaert, Denis, Caitriona Carter, dan Emmanuelle Cheyns. "Territorializing Effects of Global Standards: What Is at Stake in the Case of ‘Sustainable’ Palm Oil?" *Geoforum* 104 (2019): 1–12.
- Rum, Irlan A., Arnold Tukker, Arjan De Koning, dan Arief A. Yusuf. "Impact Assessment of the EU Import Ban on Indonesian Palm Oil: Using Environmental Extended Multi-Scale MRIO." *Science of The Total Environment* 853 (2022): 158695.
- Schoneveld, George C., Selma Van Der Haar, Dian Ekowati, dkk. "Certification, Good Agricultural Practice and Smallholder Heterogeneity: Differentiated Pathways for Resolving Compliance Gaps in the Indonesian Oil Palm Sector." *Global Environmental Change* 57 (2019): 101933.

- Setiawan, Rania Nur Hafsa. "Monopoli Pada Industri Perkebunan Kelapa Sawit: Kajian Hukum Atas Perubahan Peraturan Kementerian Pertanian No.98/2013." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11761–11762.
- Sihotang, Enrico Denis. "Analysis of Discriminatory Measures From European Union Renewable Energy Directive II To Indonesia As A Palm Oil Producer Country." *Indonesia Law Review* 12, no. 3 (2022): 48.
- Sinaga, Valerie Selvie, dan Refindie Micatie Esani Foekh. "Kebijakan Uni Eropa RED II Dan Delegated Act Terhadap Perdagangan Produk Kelapa Sawit Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 103–115.
- Sopiana, Henny Triwardani, Ali Muhammad, dan Zulfan Fakhri Mahendra. "The Effect of Pressure of Environmental Business and NGO Interests on the Policy of Restricting the EU Palm Oil Import from Indonesia and Malaysia." *E3S Web of Conferences* 316 (2021): 01022.
- Suryadi, Suryadi, Arya Hadi Dharmawan, dan Baba Barus. "Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 8, no. 3 (2021): 167–178.
- Swinnen, Johan F.M. "The Political Economy of Agricultural and Food Policies: Recent Contributions, New Insights, and Areas for Further Research." *Applied Economic Perspectives and Policy* 32, no. 1 (2010): 33–58.
- Timmermans, Stefan, dan Iddo Tavory. "Theory Construction in Qualitative Research: From Grounded Theory to Abductive Analysis." *Sociological Theory* 30, no. 3 (2012): 167–186.
- Tyson, Adam, dan Eugenia Meganingtyas. "The Status of Palm Oil Under the European Union's Renewable Energy Directive: Sustainability or Protectionism?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 58, no. 1 (2022): 31–54.

Vijay, Varsha, Stuart L. Pimm, Clinton N. Jenkins, dan Sharon J. Smith. "The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss." *PLOS ONE* 11, no. 7 (2016): e0159668.

Widyati, Enny, Hani Sitti Nuroniah, Hesti Lestari Tata, dkk. "Soil Degradation Due to Conversion from Natural to Plantation Forests in Indonesia." *Forests* 13, no. 11 (2022): 1913.

Wirawan, Soni S., Maharani D. Solikhah, Hari Setiaprja, dan Agus Sugiyono. "Biodiesel Implementation in Indonesia: Experiences and Future Perspectives." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 189 (2024): 113911.

Laporan dan Dokumentasi Institusi:

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021*. Jakarta: BPS, 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2023*. Jakarta: BPS, 2024.

Balitbang ESDM. *Biodiesel: Jejak Panjang Sebuah Perjuangan*. Cetakan kedua. Jakarta: Badan Litbang ESDM, 2021.

Basri, Faisal, Bhima Yudhistira, Wahyu Wagiman, Abdul Wahid, dan Banjaran A. Sekar. *Prahara Minyak Goreng: Dampak Kebijakan Bahan Bakar Nabati terhadap Pasokan Minyak Goreng*. Jakarta: Satya Bumi, 2023.

BPDPKS. *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: BPDPKS, 2024.

Caroko, W., H. Komarudin, K. Obidzinski, dan P. Gunarso. Policy and Institutional Frameworks for the Development of Palm Oil-Based Biodiesel in Indonesia. CIFOR, t.t.

Childs, Bradley, dan Rob Bradley. *Plants at the Pump: Biofuels, Climate Change, and Sustainability*. Washington, DC: World Resources Institute, t.t.

- Climate Action Tracker. Climate Governance: Assessment of the government's ability and readiness to transform Indonesia into a zero emissions society. CAT Climate Governance Series, 2021.
- European Commission. Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the status of production expansion of relevant food and feed crops worldwide. Brussels, 2019.
- European Commission, Directorate-General for Energy. *EU Energy in Figures: Statistical Pocketbook 2023*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023.
- European Commission, Directorate-General for Energy, dan COWI. *EU's Global Leadership in Renewables: Final Synthesis Report: July 2021*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022.
- Ichsan, Muhammad, Wiko Saputra, Anita Permatasari, dan Tazkiyah Syakira. *Jatuh Bangun Pengembangan BBN Berbasis Sawit: Titik Kritis dan Peran Pembingkai Kebijakan*. Jakarta: SPOS Indonesia, 2022.
- IESR. Critical Review on the Biofuel Development Policy in Indonesia. Jakarta: IESR, 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*. Jakarta: KPK, 2016.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit*. Jakarta: KPPU, 2006.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Position Paper KPPU Minyak Goreng*. Jakarta: KPPU, t.t.
- Meijaard, E., J. Garcia-Ulloa, D. Sheil, dkk. *Oil Palm and Biodiversity: A Situation Analysis by the IUCN Oil Palm Task Force*. Gland, Switzerland: IUCN, 2018.

- OECD dan FAO. *OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032*. Paris: OECD Publishing, 2023.
- PASPI. "Dampak Penurunan Harga BBM Terhadap Industri Sawit Indonesia." *PASPI Monitor II*, no. 04 (2016).
- PASPI. "Perkembangan Biodiesel Indonesia dan Keberatan Indonesia atas Bea Masuk Anti Dumping Uni Eropa." *PASPI Monitor III*, no. 21 (2017).
- PASPI. "Asal Usul Lahan Perkebunan Sawit Indonesia dan Polemik Deforestasi." *Jurnal PASPI II*, no. 34/09 (2021).
- PASPI. "Peranan Kebijakan Pungutan Ekspor Sawit dan BPD PKS dalam Industri Sawit Nasional." *PASPI Monitor*, no. 09 (November 2023).
- PASPI. "Kebijakan Mandatori Biodiesel 2015-2023: Menanggung Manfaat dan Beban Biaya Bersama." *PASPI Monitor*, no. 20 (April 2024).
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. *Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit*. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2024.
- Saputra, Wiko, Muhammad Ichsan, Anita Permatasari, dan Tazkiyah Syakira. *Pandangan Pemangku Kepentingan Terhadap Risiko Ekonomi dan Lingkungan Dalam Kebijakan Biodiesel Di Indonesia*. Jakarta: SPOS Indonesia, 2021.
- Sigit, Ridzki Rinanto, Rahman Rahmadi, dan Sapariah Saturi. *Di Antara Janji Kesejahteraan dan Dampak Sosial Lingkungan: Sebuah Penelusuran Jurnalistik mengenai Industri Sawit di Indonesia*. Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak, 2023.
- SPKS. *Raksasa Penerima Subsidi: B35 untuk Siapa?* Jakarta: SPKS, 2023.
- TuK Indonesia. *Taipan Komoditas Perkebunan Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: TuK Indonesia, 2023.
- UN-Habitat. *Multi-Level Governance for Climate Change in Indonesia*. Urban LED, 2020.

UNFCCC. Enhanced Nationally Determined Contribution, Republic of Indonesia. 2022.

Dokumen Pemerintah dan Hukum:

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Indonesia. Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Wawancara:

Djalil, Sofyan (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2014-2015). Wawancara oleh Penulis. Jakarta, September 2025.

Jong, Hans Nicholas (Wartawan Mongabay Indonesia). Wawancara oleh Penulis. Jakarta, September 2025.

Kurniawan, Ignatius Ery (Wartawan Info Sawit). Wawancara oleh Penulis. Jakarta, September 2025.

Machmud, Musdhalifah (Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian 2015-2023). Wawancara oleh Penulis. Jakarta, Oktober 2025.

Rudy (Petani Swadaya). Wawancara oleh Penulis. Palembang, 2025.

Sabarudin (Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit). Wawancara oleh Penulis. Jakarta, Oktober 2025.

Sibuea, Pahala (Dewan Pembina POPSI). Wawancara oleh Penulis. Jakarta, Oktober 2025.

Sigit (Petani Swadaya). Wawancara oleh Penulis. Palembang, 2025.

Surambo, Achmad (Direktur Sawit Watch). Wawancara oleh Penulis. Jakarta, Desember 2025.

Junaidi, Yulian (Akademisi Universitas Sriwijaya). Wawancara oleh Penulis. Palembang, November 2025.

Sumber Daring dan Berita:

"81% of Indonesia's oil palm plantations flouting regulations, audit finds." Mongabay, Agustus 2019. Diakses 4 Juni 2025. <https://news.mongabay.com/2019/08/81-of-indonesias-oil-palm-plantations-flouting-regulations-audit-finds/>.

BPDPKS. "CPO Price Charts." t.t. Diakses 14 November 2024. <https://www.bpdp.or.id/cpo-price-charts>.

"Betahita | Dana Sawit: Rp 4 T untuk Petani, Rp 40 T untuk Korporasi." Betahita, t.t. Diakses 1 November 2025. <https://betahita.id/news/detail/9303/dana-sawit-rp-4-t-untuk-petani-rp-40-t-untuk-korporasi.html>.

"DPR Tolak Usulan Subsidi BBN." Antara News, 9 Februari 2009. Diakses 14 November 2024. <https://www.antaranews.com/berita/132388/dpr-tolak-usulan-subsidi-bbn>.

Greenpeace Southeast Asia. "Plan to Sacrifice 20 Million Hectares of Forest Makes Mockery of Indonesia's Climate and Biodiversity Commitments." 20 Maret 2025. Diakses 4 Juni 2025. <https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/66739/plan-makes-mockery-of-climate-biodiversity-commitments/>.

Hermawan, Erwan. "Dana Sawit: Kroni, Emisi, Deforestasi." *Majalah Tempo*, 10 April 2022. Diakses 14 November 2024. <https://www.tempo.co/investigasi/dana-sawit-subsidi-bpdps-109316>.

"Indonesia | Climate Action Tracker." Diakses 4 Juni 2025. <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>.

InfoSawit. "Lahan Sawit Bersertifikat ISPO Capai 4,09 juta Ha, Libatkan 816 Pelaku Sawit Termasuk Petani." 17 Januari 2024. <https://www.infosawit.com/2024/01/17/lahan-sawit-bersertifikat-ispo-capai-409-juta-ha-libatkan-816-pelaku-sawit-termasuk-petani/>.

Kobo, Youssef. "How the European Union's Protectionism Is Hurting Developing Economies." *TRT World*, 2019. <https://www.trtworld.com/opinion/how-the-european-union-s-protectionism-is-hurting-developing-economies-26771>.

Kompas.id. "Ekspansi Kelapa Sawit di Masa Moratorium." *Litbang Kompas*, 15 Juni 2022. <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/06/15/ekspansi-kelapa-sawit-di-masa-moratorium>.

PASPI. "Biodiesel Indonesia: Produksi, Konsumsi dan Ekspor (2024)." t.t. Diakses 28 Juni 2024. <https://palmoilina.asia/sawit-hub/biodiesel-indonesia/>.

"SPKS Dorong Aturan yang Wajibkan Kemitraan Petani Sawit-Industri Biodiesel." *Investor.id*. Diakses 26 November 2025. <https://investor.id/business/377872/spks-dorong-aturan-yang-wajibkan-kemitraan-petani-sawitindustri-biodiesel>.

Wijaya, Arief, dan Hidayah Hamzah. "Definisi dan Metodologi Data Kehilangan Hutan Indonesia." WRI Indonesia, 26 Juni 2020. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/blog-teknis-global-forest-watch-definisi-dan-metodologi-data-kehilangan-hutan-indonesia>.

